

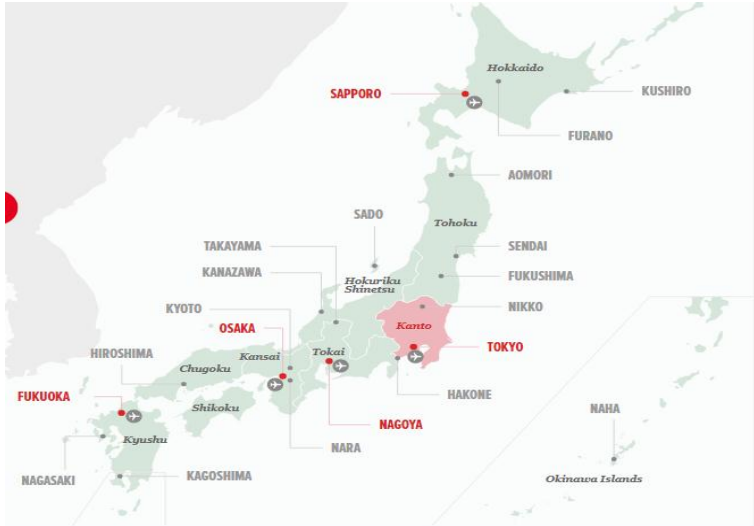
## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN KERJASAMA JEPANG – ASIA TENGGARA**

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia. Jepang terletak di lepas pantai timur benua Asia yang terbentang dari utara (garis bujur utara 45° 33') ke selatan (garis bujur utara 20° 25'). Jepang dikelilingi oleh laut Okhtos di sebelah utara, laut China di sebelah barat, dan samudera pasifik di sebelah timur dan selatan. Selain itu Jepang juga berdekatan dengan beberapa negara seperti Uni Soviet di sebelah utara, Amerika di sebelah timur, China dan Korea di sebelah barat serta Taiwan dan Philipina di sebelah selatan (Haryanti, 2013 ).

Dengan jumlah penduduk 127 juta jiwa, Jepang memiliki luas daratan sekitar Jepang 378.000 km<sup>2</sup>, yaitu satu per dua puluh lima dari luas Amerika Serikat (sedikit lebih kecil daripada California), satu per dua puluh dari Australia, dan 1,5 kali luas Britania. Tiga perempat dari wilayah Jepang berbentuk gunung-gunung, sedangkan wilayah lainnya berbentuk cekungan dan dataran. Jepang terdiri dari banyak pulau-pulau yang panjangnya membentang 3000 kilometer dari utara ke selatan. Empat pulau utama Jepang adalah Kyushu, Hokkaido, Honshu, dan Shikoku (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia).

Secara administratif, wilayah Jepang dibagi dengan istilah *to-do-fu-ke*. *To* untuk ibukota Jepang, yaitu Tokyo, *Do* untuk kepulauan Hokkaido, *fu* untuk dua daerah istimewa Jepang yakni Osaka-*fu* dan Kyoto-*fu*, dan *ken* atau yang lebih dikenal dengan istilah prefektur sebanyak 43 prefektur. Berdasarkan geografis dan sejarahnya, 47 daerah tersebut, yaitu Tokyo, Hokkaido, Osaka dan Kyoto serta 43 prefektur dikelompokkan menjadi sembilan kawasan, yakni: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa.



Gambar 2.1 : Peta Wilayah Jepang

Sumber : (JNTO)

Jepang merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan negara monarki konstitusional, dimana kekuasaan kaisar sangatlah dibatasi. Kaisar Jepang hanyalah menjadi kepala negara secara seremonial yang diatur konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Sedangkan kekuasaan penuh pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan anggota parlemen yang terpilih. Sementara untuk kedaulatan, sepenuhnya berada di tangan rakyat . Kaisar Jepang hanyalah bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Kaisar Jepang yang memimpin pada saat ini adalah Kaisar Akihito yang telah memimpin sejak tahun 1989 hingga sekarang, sedangkan perdana menteri Jepang pada saat ini adalah perdana menteri Shinzo Abe (Haryanti, 2013 ).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe II, Pariwisata merupakan salah satu industri yang fokus dikembangkan oleh Jepang. Dimana banyak kebijakan pariwisata yang dirancang oleh pemerintahan Jepang sebagai strategi untuk menarik wisatawan asing agar berkunjung ke Jepang. Salah satu kebijakan pariwisata Jepang pada masa pemerintahan perdana menteri Shinzo Abe adalah “*Halal Tourism*”, dimana target dari kebijakan ini adalah wisatawan Muslim Asia Tenggara.

Hubungan Jepang dengan Asia Tenggara telah terjalin sejak lama. Pasca perang dingin berakhir disertai munculnya fenomena “kebangkitan China” (*the rise of China*) telah menghadapkan Jepang pada dinamika internasional yang memaksanya untuk melakukan berbagai macam tindakan penyesuaian (*adjustment*) dalam dunia diplomasi, baik itu di tingkat regional maupun internasional. Progrevisitas China dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, baik dalam kerangka bilateral ataupun dalam kerangka ASEAN, menjadi sebuah tantangan serius bagi posisi internasional Jepang sebagai salah satu mitra terpenting bagi negara- negara Asia Tenggara (Hadi, 2009).

Hubungan formal Jepang dengan ASEAN dimulai dengan dibentuknya mekanisme ASEAN-JAPAN forum pada Maret 1977, dimana kemudian pada Mei 1981 didirikanlah *Promotion Center on Trade, Investment and Tourism* berdasarkan persetujuan antara negara- negara ASEAN dan Jepang. Dalam bidang politik-keamanan, kerja sama ASEAN-Jepang diarahkan pada penanganan isu-isu non-tradisional seperti terorisme dan *maritime security* . Selain itu, Jepang juga menjalin kerjasama dengan Asia Tenggara dalam banyak bidang termasuk Ekonomi, perdagangan dan Pariwisata serta sektor lainnya.

## A. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Jepang – Asia Tenggara

Dalam isu ekonomi, ASEAN dan Jepang menekankan pada sektor kemitraan ekonomi dan kerja sama di bidang finansial. Pada tahun 2002 Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi berkunjung ke lima negara ASEAN ( Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Di tengah kunjungannya tersebut Koizumi mengeluarkan sebuah *statement* berjudul “*Japan and the ASEAN in East Asia a Sincere and Open Partnership*”, yang kemudian dikenal dengan Koizumi *Doctrine*. Doktrin tersebut menekankan pada aksi bersama dan maju bersama sebagai *candid partners*, dengan menekankan poin-poin kerjasama sebagai berikut (Hadi, 2009):

1. Menjalankan pembaharuan dan meningkatkan kemakmuran;
2. Memperkuat kerjasama untuk memelihara stabilitas;
3. Kerjasama untuk masa depan yang terdiri dari
  - a. Pendidikan dan pengembangan SDM
  - b. Menjadikan tahun 2003 sebagai “*Year of ASEAN- Japan Ezchange*”
  - c. Inisiatif kemitraan Ekonomi ASEAN-Jepang
  - d. Sebuah proposal untuk meluncurkan “an Initiative for Development in East Asia
  - e. Intensifikasi kerjasama keamanan ASEAN-JEPANG, termasuk dalam isu-isu transnasional.

Sebelumnya, “*Koizumi Doctrine*” secara prinsipil merupakan pengulangan dari “*Fukuda Doctrine (1977)*” yang disampaikan oleh Takeo Fukuda selaku Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Dalam “*Fukuda Doctrine*” Perdana Menteri Fukuda menyampaikan bahwa “Asia Tenggara merupakan mitra utama Jepang dalam kiprah internasionalnya, dengan menegaskan prinsip *equal partnership*. Doktrin ini menegaskan pula bahwa dalam hubungannya dengan Asia Tenggara, Jepang ikut melibatkan aspek budaya yang lebih

mendalam, atau dapat disimpulkan dalam istilah *heart to heart relations*. Dalam “*Koizumi Doctrine*” Jepang lebih menekankan kepada intensifitas kerjasama ekonomi dan keamanan dalam hal isu-isu transnasional antara ASEAN dan Jepang. Hal inilah yang kemudian menjadi poin pembeda antara kedua doktrin tersebut.

Penguatan Kerjasama antara ASEAN dan Jepang dimulai dengan pelaksanaan *ASEAN-Japan Commemorative Summit*, 11-12 Desember 2003 di Tokyo dan ditandatangani “*Tokyo declaration of The dynamic and Enduring ASEAN-Japan plan of Action*” yang merupakan cetak biru kerja sama ASEAN-Japan secara komprehensif pada *Commemorative summit* tersebut. Jepang telah mengaksesi *Treaty of amity and Cooperation* (TAC) pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta (Kemlu , 2015).

Keinginan Jepang dalam meningkatkan posisinya dalam hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, dalam kerangka ASEAN tercermin dalam KTT ASEAN-JEPANG ke-10, di Cebu pada Januari 2007. Dalam konferensi tersebut, Jepang mengusulkan pembentukan *Eminent Person’s Group* (EPG) antara Jepang dan ASEAN. EPG Jepang dan ASEAN ini difungsikan untuk mengelaborasi *Join Statement on Deepening and Broadening the ASEAN-Japan Strategic Partnership* yang di tanda tangani di Kuala Lumpur pada, 13 Desember 2005. Dalam *join statement* tersebut antara lain ditegaskan bahwa Jepang sepenuhnya mendukung peningkatan kontribusi aktif ASEAN terhadap kerjasama regional di Asia Timur, khususnya melalui peranannya sebagai *the driving force* untuk memajukan integrasi ASEAN (Hadi, 2009).

Kemudian, pada KTT ke 11 pada November 2007, kedua belah pihak yakni Jepang dan ASEAN kembali mengeluarkan statement sebagai bentuk kelanjutan kerjasama keduanya, yakni *joint statements of The Conclusion of the Negotiation for the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* atau yang biasa dikenal dengan negosiasi AJCEP

*agreement*. Negosiasi AJCEP *agreement* ditanda tangani pada awal tahun 2008. Sebagai bagian dari AJCEP , Jepang dan ASEAN harus mulai melakukan negoisasi untuk bidang jasa dan investasi satu tahun setelah AJCEP (Kemlu , 2015).

Pada tahun yang sama yakni 2013, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengunjungi sepuluh negara anggota ASEAN, hal ini memperlihatkan bagaimana besarnya perhatian Jepang terhadap Asia Tenggara. Pada tahun yang sama KTT ASEAN-Jepang kembali dilaksanakan, sekaligus sebagai perayaan 40 tahun hubungan ASEAN-Jepang. Dalam konferensi tersebut dihasilkanlah sebuah kerjasama berupa *Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation atau Tokyo Vision*. *Tokyo Vision* mempunyai arti strategis bagi masa depan kedua kawasan baik ASEAN ataupun Jepang, berupa peningkatan kerja sama keamanan dan stabilitas (*partner for peace and stability*), kesejahteraan (*partner for prosperity*), mutu kehidupan (*partner for quality of life*), dan kerja sama dari hati ke hati (*heart to heart partner*) (Koran Sindo, 2013).

Dalam Mempertahankan hubungan kerjasama Jepang dan ASEAN, Perdana Menteri Shinzo Abe memiliki 5 prinsip sebagai peganganya yakni (Viva, 2013) :

1. Memperluas dan mengamalkan nilai-nilai universal, seperti kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Melindungi teritorial laut yang harus terbuka, bebas dan sesuai dengan hukum laut internasional;
3. Menggalakkan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan;
4. Melindungi dan memelihara tradisi dan kebudayaan ASEAN yang beragam;
5. Mempromosikan pertukaran generasi muda di bidang pendidikan.

## **B. Kerjasama Pariwisata Jepang – Asia Tenggara**

Selain dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kerjasama ASEAN dan Jepang juga terjalin lebih jauh dalam bidang Pariwisata. Sebagai bagian dari ASEAN Plus Three (Jepang, RRT, Korea Selatan). Jepang turut aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN Plus Three termasuk dalam bidang pariwisata. Pada tahun 2011 Menteri pariwisata ASEAN bersama dengan Menteri pariwisata dari tiga negara mitra Jepang, RRT, dan Korea Selatan (ASEAN Plus Three) telah sepakat untuk bersama-sama meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan ASEAN Plus Three dengan cara memberikan kemudahan perjalanan bagi para wisatawan, meningkatkan kualitas produk pariwisata, serta menjalin kerjasama konkrit dan terus berbagi pengalaman terutama dalam sektor pariwisata melalui kegiatan yang dilakukan bersama.

Para Menteri pariwisata menyambut baik keputusan yang dibuat oleh ASEAN Plus Three (*APT Summit*) ke-14 dan KTT ASEAN plus satu yang telah diadakan di Bali pada 18 Oktober 2011 lalu, serta turut menyatakan dukungannya terhadap *APT Cooperation Work Plan (2007-2017)*. *APT Cooperation Work Plan* merupakan sebuah rencana kerja diantara negara-negara APT sebagai rencana induk untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama negara-negara APT secara komprehensif dan saling menguntungkan (KEMENPAR, 2012).

Rencana kerja tersebut dirumuskan pada 20 November 2007 dengan tema "*Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation*". Rencana kerja APT mencakup banyak bidang, seperti politik dan keamanan, kerjasama kelautan, ekonomi dan investasi, pariwisata dan beberapa bidang lain. Rencana kerja APT yang dirumuskan dalam bidang pariwisata adalah (MOFA) :

1. Mempromosikan pengembangan pariwisata berkualitas sesuai dengan standar manajemen dan

sertifikasi lingkungan ASEAN untuk pariwisata berkelanjutan, dan menempe kolaborasi konkrit dalam budaya dan ekowisata, pelayaran pariwisata, pertukaran pemuda, pengembangan tenaga kerja, pemasaran dan promosi pariwisata bersama dengan jaminan kualitas dan tindakan keamanan bagi wisatawan.

2. Mempromosikan keterkaitan dan memperkuat kerjasama di antara organisasi pariwisata nasional dan lembaga pelatihan, yang mencakup bidang-bidang seperti pertukaran informasi pariwisata, sumber daya manusia perkembangan dan krisis komunikasi, dan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam kerja sama tersebut.

Dalam rangka realisasi kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (*APT Cooperation Work Plan 2007-2017*) tersebut, para menteri pariwisata menugaskan pejabat - pejabat tinggi mereka untuk mempersiapkan *Memorandum of Cooperation on ASEAN Plus Three Tourism Cooperation* untuk ditandatangani pada pertemuan Menteri pariwisata APT ke-12. Demikian antara lain hasil pertemuan menteri pariwisata ASEAN dengan Menteri pariwisata dari tiga negara mitra kerja Jepang, RRT, dan Korea Selatan (*ASEAN Plus 3*) ke-11 dalam rangkaian kegiatan *ASEAN Tourism Forum (ATF) 2012* yang telah berlangsung di Manado, pada kamis 12 Januari 2011 (KEMENPAR, 2012) :

1. Pada APT ke 11, Pertemuan Menteri pariwisata dipimpin oleh Ketua sidang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu serta Wakil Ketua Menteri Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata Laos Bosengkham Vongdara.
2. Harapan para menteri mengenai dapat diselesaikannya *ASEAN-ROK Air Transport Agreement* dalam rangka mencapai pengaturan



- penerbangan terbuka yang meliputi liberalisasi hak kebebasan lalu lintas udara ke-3, 4, dan 5.
3. Penghargaan para menteri kepada Jepang atas dukungannya atas berbagai kegiatan pariwisata melalui ASEAN Japan Centre (AJC) di antaranya pameran ASEAN 2011 serta lokakarya teknis tentang wisata *cruise* untuk ASEAN di Tokyo dan Osaka pada tahun lalu, serta kepada Korea Selatan yang mengadakan program kerja konkrit di antaranya menyelenggarakan *ASEAN Tourism and Culture Fair* serta program pengembangan sumber daya manusia ASEAN bidang pariwisata.
  4. Sementara untuk kunjungan wisatawan ke ASEAN Plus 3, para menteri mencatat tetap tinggi mencapai 70,1 juta pada 2011 atau tumbuh 12,64%, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global di beberapa pasar utama.

Pada tahun 2012 diluar kerjasama APT, Jepang kembali menjalin kerjasama pariwisata secara bilateral dengan ASEAN. Melalui *The Japan Tourism Agency* (JTA) bersama dengan *The Japan National Tourism Organization* (JNTO) dan *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) serta *Japan Centre* menyelenggarakan beberapa pertemuan, seminar dan konferensi terkait dengan pariwisata halal di beberapa kota di seluruh Jepang, sebagai hasilnya adalah, tempat tempat yang ramah dan cocok untuk turis muslim telah disiapkan, penyediaan makanan dan minuman halal telah diatur, dan fasilitas sholat telah tersedia di tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan bandara (Yasuda, 2017)

Pada tahun 2013, Jepang kembali menjalin kerjasama pariwisata dengan ASEAN dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three (Jepang, China, Republik Korea) mengadakan pertemuan di Vientiane Laos pada 21 Januari 2013 untuk membahas mengenai kerjasama pariwisata

diantara negara-negara tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa pernyataan bersama terkait kerjasama pariwisata antara ASEAN Plus Three. Pernyataan bersama tersebut adalah (KEMENPAR, 2013) :

1. ASEAN Plus Three (China, Jepang dan Republik Korea) mengadakan pertemuan yang dihadiri 12 menteri pariwisata ASEAN Plus Three. Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Vientiane, Laos.
2. Tahun 2012 merupakan tahun yang dinamis bagi pariwisata negara APT. Kedatangan wisatawan internasional menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan ditingkatkannya konektivitas, terutama aksesibilitas udara antara negara-negara APT, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan positif 11,9 dibandingkan dengan 2011. Pada 2012, negara-negara APT menerima lebih dari 98 juta kunjungan internasional. Intra-APT negara tetap sebagai sumber utama pasar dengan pangsa 64,8 persen dibandingkan dengan total kunjungan internasional pada tahun 2011.
3. Para menteri menyambut baik hasil dari KTT APT ke-15 dan ASEAN Plus One Summits yang diselenggarakan pada tanggal 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja, dan mendukung Ulasan Jangka Menengah (Mid-Term Review) pelaksanaan Rencana Kerja Kerjasama APT (2007-2017).
4. Dalam melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Rencana Kerja APT, para menteri mengadopsi Rencana Kerja Kerjasama Pariwisata APT 2013-2017. Penerapan Rencana Kerja Kerjasama Pariwisata APT nantinya akan mempromosikan hubungan dan memperkuat kerjasama antar Organisasi Pariwisata Nasional. Para menteri sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pariwisata APT untuk menerapkan Rencana Kerja tersebut.
5. Memperhatikan pentingnya kerjasama pariwisata APT, para menteri menegaskan kembali komitmen mereka

untuk memperdalam dan memperluas kolaborasi. Para menteri mencatat keberhasilan tahun 2012 sebagai "Tahun Kunjungan ASEAN Plus Three".

6. Memperhatikan peran penting aksesibilitas antara negara-negara APT dalam pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, para menteri puas dengan peningkatan kemajuan kolaborasi di sektor transportasi antara ASEAN dan China, Jepang, dan Korsel, terutama pada inisiatif konektivitas udara antara ASEAN dan meningkatkan masing-masing antara ASEAN dan negara-negara masing-masing negara Plus Three.
7. Para menteri mengakui peran penting dari ASEAN-Japan Centre, ASEAN-Korea Centre dan ASEAN-China Centre untuk lebih mempromosikan pertukaran pariwisata antara negara – negara ASEAN Plus Three, dan menyatakan penghargaan mereka atas bantuan teknis yang diberikan ketiganya di bidang promosi pariwisata, partisipasi dalam pameran perjalanan besar dan peningkatan kapasitas.
8. Para Menteri Pariwisata ASEAN menyampaikan apresiasi mereka kepada China atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada negara anggota ASEAN melalui penyediaan stan gratis di *China International Travel Mart (CITM)* 2012, pelatihan pariwisata, shooting film dokumenter, dan pengembangan website pemasaran pariwisata ASEAN dalam bahasa China.
9. Para Menteri Pariwisata ASEAN mengucapkan terima kasih Jepang atas bantuan yang diberikan kepada negara anggota ASEAN terutama pada pelaksanaan berbagai kegiatan pariwisata ASEAN-Jepang di tahun 2012.
10. Para Menteri Pariwisata ASEAN menyampaikan apresiasi mereka kepada Republik Korea atas dukungannya terhadap perkembangan ASEAN Pariwisata melalui berbagai kegiatan promosi dan peningkatan kapasitas.

11. Melalui pertemuan ini, para menteri juga menyatakan simpati dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum H.E. Chumpol Silapa-archa, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, dan kepada pemerintah dan rakyat Thailand untuk wafatnya beliau.
12. Para menteri menyatakan penghargaan yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Laos atas keramah-tamahan yang diberikan kepada delegasi dan pengaturan yang sangat baik untuk pertemuan ini.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe , Asia Tenggara menjadi target utama dari kebijakan pariwisata Jepang, salah satunya adalah kebijakan *halal tourism*, yang menjadikan Muslim Asia Tenggara sebagai sasaran utamanya. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Japan Tourism Agency pada tahun 2013 dalam artikel yang ditulis Yasuda (2017) yang berisi :

*“Pemerintah Jepang dan administrator lokal telah berfokus terutama pada wisatawan Asia Tenggara, dan telah bekerja erat pada perbaikan terkait keberagaman ketergantungan pada wisatawan internasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan tahunannya (kertas putih) tentang pariwisata 2013, JTA berharap untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan asiann tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina, terutama wisatawan muslim dari negara-negara ini, dengan menghapus semua rintangan yang mungkin menghambat perjalanan mereka.”* (Yasuda, 2017).

Hal ini tentu saja bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat hubungan Asia Tenggara dan Jepang yang sangat dekat. Peningkatan hubungan kerjasama antara Jepang dan ASEAN kembali meningkat pada tahun 2017. Tepatnya pada April 2017, menteri-menteri Ekonomi ASEAN memulai rangkaian kegiatan *roadshow* di Tokyo yang akan dilanjutkan ke Kyoto, Osaka, dan berakhir pada 8 April di Wakayama City. Roadshow tersebut bertajuk "Era Baru Kerja Sama Ekonomi ASEAN–Jepang untuk Mengukir Masa Depan Bersama ASEAN dan Jepang dengan Mendukung Industri Baru dan UKM". Dalam keterangan resminya, Menteri Enggar Lukita mengatakan bahwa, di tengah ketidakpastian perdagangan dunia seperti saat ini, ASEAN dan Jepang justru berupaya menggali lebih jauh potensi hubungan kemitraan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi (Sihite, 2017).

Sejak pertama kali dijalin pada tahun 1977, hubungan kerjasama antara Jepang dan Asia Tenggara, baik itu dalam kerangka bilateral maupun ASEAN semakin meningkat. Hubungan baik antara kedua pihak menjadi sebuah kesempatan emas bagi Pemerintahan Jepang untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai sasaran utama dari kebijakan pariwisatanya, yang dirumuskan pada tahun 2013. Dimana salah satu kebijakan tersebut adalah *halal tourism*, yang kini telah menjadi industri pariwisata baru yang mendunia.